

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. BPS juga mengklasifikasikan TPAK menjadi tiga kategori, pertama yaitu TPAK kasar, mengukur secara keseluruhan partisipasi angkatan kerja tanpa mengelompokkan karakteristik tertentu. Kedua yaitu TPAK spesifik, yang menyajikan gambaran data mengenai kondisi angkatan kerja berdasarkan karakteristik tertentu seperti pendidikan, wilayah atau berdasarkan usia. Terakhir yaitu TPAK menurut jenis kelamin yang menyajikan TPAK secara terpisah antara laki-laki dan perempuan guna memperlihatkan perbandingan keterlibatan partisipasi berdasarkan gender. Secara khusus penelitian ini memilih TPAK menurut jenis kelamin, dimana TPAK perempuan menjadi fokus utama.

TPAK perempuan terdiri dari penduduk perempuan usia kerja produktif (berusia 15 tahun ke atas) yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TPAK perempuan merupakan gambaran sejauh mana penduduk perempuan usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. BPS merumuskan perhitungan TPAK perempuan sebagai berikut:

$$TPAK_p = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Penduduk Perempuan Usia Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan kesempatan yang dimiliki perempuan untuk terlibat di pasar tenaga kerja. Ketika kontribusi perempuan terhadap perekonomian semakin besar maka persentase TPAK perempuan juga semakin tinggi. Namun disisi lain peran sosial yang berbeda, tanggung jawab rumah tangga, pendidikan, serta kebijakan publik menjadi faktor pengaruh rendahnya TPAK perempuan dibanding laki-laki di pasar tenaga kerja. (Fadliyanti *et al.*, 2023). Zaheer (2016) memberikan pendapat jika dilihat dari perspektif ekonomi TPAK perempuan berfungsi sebagai ukuran efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya manusia perempuan. Peningkatan TPAK perempuan tidak hanya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan keterlibatan perempuan dalam memanfaatkan peluang kerja semakin tinggi yang pada gilirannya mendorong dinamika pembangunan di suatu daerah.

Menurut teori *New Home Economics* (NHE) yang dikemukakan oleh Becker (1965) partisipasi kerja perempuan merupakan hasil dari keputusan rasional dalam rumah tangga untuk memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan alokasi waktu antara kegiatan domestik dan produktif. Perempuan dengan tanggung jawab domestik lebih tinggi, dihadapkan dengan biaya kesempatan yang lebih tinggi ketika memutuskan untuk bekerja. Biaya kesempatan yang dimaksud merupakan waktu dan tenaga yang dialokasikan untuk tugas rumah tangga dan pengasuhan, sehingga ketika beban domestik yang dimiliki seorang perempuan tinggi maka waktu yang dimiliki untuk bekerja di pasar tenaga kerja cenderung terbatas. Disisi lain, tingginya beban domestik juga dapat meningkatkan partisipasi perempuan untuk bekerja yang dianggap sebagai *respons* terhadap tekanan

ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Oleh sebab itu, struktur rumah tangga memiliki pengaruh yang *kompleks* terhadap keputusan perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Teori NHE memberikan landasan untuk memahami bagaimana faktor seperti beban tanggungan tinggi dan daerah dengan budaya gender kuat dapat menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Dual Labor Market Theory yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1970) membagi pasar tenaga kerja menjadi dua sektor utama, yaitu sektor primer yang ditandai dengan pekerjaan dengan upah tinggi, stabilitas kerja dan peluang karir yang jelas, sedangkan sektor sekunder umumnya memiliki upah rendah, kondisi kerja kurang ideal dan peluang kemajuan dalam pekerjaan yang terbatas. Teori ini memberikan pandangan bahwa dominasi perempuan dalam sektor sekunder terjadi karena hambatan struktural seperti akses pendidikan, beban domestik, serta anggapan feminim pekerjaan yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam pekerjaan berupah rendah dan tidak stabil. sudut pandang ini memberikan gambaran jelas mengapa perempuan masih dominan terlibat pada jenis pekerjaan informal dan bagaimana segmentasi pasar kerja terjadi. (Li *et al.*, 2024).

2.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesempatan yang didapatkan perempuan terhadap akses bidang ekonomi, politik serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan setara dengan yang didapatkan laki-laki. Terdapat tiga komponen yang dihitung dalam indeks pemberdayaan gender, yaitu

keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG dihitung berdasarkan rata-rata aritmetika dari ketiga komponen tersebut.

$$IDG = \frac{I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis}}{3}$$

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimana:

IDG = Indeks pemberdayaan gender

I_{par} = Perempuan di parlemen

I_{DM} = Perempuan sebagai tenaga kerja profesional

$I_{inc-dis}$ = Sumbangan pendapatan perempuan

Partisipasi perempuan di parlemen merupakan ukuran dari seberapa banyak kursi legislatif yang diduduki perempuan dibandingkan dengan total jumlah kursi yang tersedia dilembaga tersebut. Perempuan sebagai tenaga profesional yaitu proporsi peran aktif perempuan pada dunia kerja dan keputusan mereka dibidang tertentu (seperti dokter, dosen peneliti dll). Sedangkan sumbangan pendapatan perempuan merupakan ukuran kontribusi pendapatan perempuan terhadap total pendapatan pada suatu wilayah. Selain itu BPS juga mengklasifikasi IDG ke dalam skala dari 0 – 100 dengan kategori:

Tabel 2. 1
Kategori Indeks Pemberdayaan Gender

Nilai Indeks	Kategori
< 50	Rendah
$50 \leq IDG < 60$	Sedang
$60 \leq IDG \leq 80$	Tinggi
> 80	Sangat Tinggi

Charlotte Perkins Gilman dalam perspektif *Feminisme* ekonomi menekankan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki berasal dari aktivitas ekonomi perempuan yang tidak diakui sehingga mereka bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Pandangan ini relevan dengan penelitian karena IDG merupakan ukuran sejauh mana ketergantungan tersebut menurun sejalan dengan perbaikan akses perempuan terhadap pekerjaan profesional, pendapatan yang dihasilkan, serta keterlibatannya dalam pengambilan keputusan. Menurut Gilman ketika capaian indeks pemberdayaan gender meningkat cenderung meningkatkan kesempatan yang dimiliki perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik (*Women and Economics*, 1898).

Selain itu ketergantungan ekonomi yang terjadi akan mengakibatkan terciptanya batasan psikologis dan sosial yang pada gilirannya akan menghambat keterlibatan perempuan dalam ruang politik dan pekerjaan profesional. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap harga diri dan identitas mereka. Maka ketika kebebasan perempuan dalam bidang ekonomi tercapai, cenderung menggeser kekuasaan gender menuju pemberdayaan perempuan secara lebih luas, sehingga pada akhirnya akan memperkuat pengakuan sosial perempuan dalam masyarakat.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP menyebutkan bahwa IPM merupakan indikator yang menunjukkan capaian

pembangunan manusia secara terukur dan memberikan gambaran kualitas hidup penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung IPM dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator dari kesehatan merupakan rata-rata lamanya waktu hidup (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai individu sejak lahir. Indikator AHH dianggap mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk pada suatu wilayah.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator dari indeks pendidikan. HLS menunjukkan jumlah harapan lama tahun anak usia sekolah sedangkan RLS menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.
3. BPS mengukur standar hidup layak dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan karena data dianggap lebih stabil dan dapat diukur hingga level daerah.

Pada umumnya IPM digunakan sebagai indikator untuk melihat capaian pembangunan suatu wilayah karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Persentase IPM yang tinggi mengidentifikasi akses yang dimiliki oleh individu terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi termaksimalkan secara maksimal, Sedangkan IPM rendah mencerminkan akses individu terhadap layanan tersebut masih terbatas. Dilihat dari perspektif ketenagakerjaan IPM dianggap relevan karena ketika pendidikan yang didapatkan lebih baik dapat memberikan dampak pada peningkatan keterampilan

dan kesempatan kerja, selain itu kapasitas produktif dan standar hidup yang lebih baik juga dihasilkan dari perbaikan akses pada bidang kesehatan sehingga mendorong penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Badan pusat statistik merumuskan perhitungan IPM dari tiga komponen utama yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dari rumus diatas dapat dilihat baik komponen kesehatan, pendidikan ataupun pengeluaran (ekonomi) memiliki nilai yang sama. Maka jika ada perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi nilai IPM secara keseluruhan. Selain itu BPS juga mengklasifikasi IPM ke dalam skala dari 0 – 100 dengan kategori:

Tabel 2. 2
Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks	Kategori
< 60	Rendah
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$70 \leq IPM \leq 80$	Tinggi
> 80	Sangat Tinggi

Dalam penelitian IPM yang digunakan secara khusus merupakan IPM perempuan. IPM perempuan menunjukkan kualitas pembangunan manusia pada kelompok perempuan melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Pemilihan indikator ini didasarkan dari kondisi pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, maka penggunaan IPM perempuan memungkinkan analisis yang lebih tepat untuk melihat bagaimana kualitas hidup perempuan memberikan kontribusi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan. IPM perempuan juga dihitung dari komponen yang sama dengan IPM umum, hanya saja data pendidikan, kesehatan, dan standar hidup fokus pada perempuan di wilayah bersangkutan.

Teori *Human Capital* yang diperkenalkan oleh Becker (1992) yang menyebutkan bahwa manusia itu bukan hanya sebagai sumber daya tetapi juga sebagai modal yang mempunyai nilai tersendiri. Investasi pada bidang pendidikan dianggap sebagai faktor utama untuk meningkatkan kemampuan kognitif, berpikir kritis dan keterampilan teknis yang relevan dengan di pasar kerja. Sedangkan investasi pada bidang kesehatan dianggap penting karena individu dengan kondisi fisik yang baik serta mental yang stabil dianggap mampu melaksanakan pekerjaan secara maksimal dan konsisten. Teori ini juga beranggapan bahwa sebagai bentuk investasi non formal pelatihan kerja dapat membantu individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara langsung yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Selain bermanfaat bagi individu, investasi pada *Human Capital* juga berdampak positif bagi makroekonomi dengan efisiensi tenaga kerja yang meningkat, pertumbuhan produktivitas dan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing secara ekonomi. Maka dari itu, menurut teori *Human Capital* pembangunan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh modal fisik dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Ketika tingkat investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelatihan kerja lebih tinggi, semakin besar juga kecenderungan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Rasio Ketergantungan

Perserikatan bangsa - bangsa (PBB) tahun 2007 mengartikan Rasio Ketergantungan sebagai indikator demografis yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari anak-anak berusia 0 – 14 tahun dan lansia diatas 65 tahun dengan penduduk usia produktif yaitu penduduk usia 15 – 64 tahun yang secara ekonomi memiliki kontribusi terhadap kegiatan produksi. Rasio ketergantungan secara matematis dihitung melalui pembagian antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif sebagaimana berikut:

$$RK = \frac{p_{0-14} + p_{65+}}{p_{15-64}} \times 100$$

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimana:

RK : Rasio Ketergantungan

P_{0-14} : Jumlah penduduk anak – anak

P_{65+} : Jumlah penduduk lansia

P_{15-64} : Jumlah penduduk usia produktif

Hasil dari perhitungan akan menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif menanggung beban (biaya) penduduk usia tidak produktif. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan semakin besar juga beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif begitupun sebaliknya. Faktor ekonomi, sosial dan demografis seperti tingginya tingkat kelahiran, peningkatan harapan hidup dan perpindahan penduduk usia produktif di suatu wilayah dapat

mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio ketergantungan tersebut. Selain itu, kondisi kemiskinan, terbatasnya akses terhadap kesehatan dan lapangan pekerjaan cenderung menghambat sebagian penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif, lalu adanya kerusakan lingkungan dan kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah juga dapat memperbesar nilai rasio ketergantungan wilayah tersebut.

Dalam *Labor Force Theory* yang diperkenalkan oleh Mincer *et al.*, (2016), mengenai kombinasi antara faktor ekonomi, sosial dan demografis menjadi pengaruh keputusan individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Selain dari jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan teori ini juga melihat angkatan kerja dari hubungan antara kesempatan ekonomi, tanggung jawab domestik dan kondisi sosial di suatu wilayah. Disisi lain faktor demografis yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam pasar kerja yaitu beban keluarga yang tercermin dalam konsep rasio ketergantungan. Menurut teori ini tingginya rasio ketergantungan dapat menekan sosial dan beban domestik yang ditanggung individu usia produktif, khususnya bagi perempuan yang cenderung berhadapan dengan pilihan antara mencari pendapatan (bekerja) guna membantu kebutuhan keluarga (TPAK-P meningkat) atau bertanggung jawab dengan merawat keluarga (TPAK-P menurun). Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan atau peningkatan partisipasi kerja perempuan bukan hanya akibat dari akses terhadap peluang ekonomi, tetapi juga karena interaksi antara tanggung jawab domestik, dan kondisi ekonomi rumah tangga.

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita merupakan indikator yang memberikan gambaran aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB diartikan sebagai ukuran keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah pada periode tertentu (Sukirno, 2013). Terdapat dua perhitungan utama mengenai PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) yang merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Secara khusus PDRB yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB ADHK karena dalam perhitungannya ADHK menghilangkan efek inflasi atau perubahan harga dari tahun ke tahun, sehingga dianggap lebih tepat digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi riil. Dari data tersebut kemudian dihitung PDRB Per Kapita ADHK dengan membagi total PDRB ADHK dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang disajikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah baik provinsi, kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu:

Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok.
- e. Ekspor netto.

Dilihat dari perspektif teori Transformasi Struktural (Lewis, 1954) maupun model pertumbuhan Neoklasik (Solow, 1956). peningkatan PDRB per kapita biasanya diikuti dengan perubahan dalam struktur perekonomian. Wilayah dengan dominasi sektor pertanian yang padat karya perlahan berpindah ke sektor industri

dan jasa yang kemudian membuka lebih banyak peluang kerja formal bagi perempuan, karena keduanya cenderung menawarkan jenis pekerjaan yang lebih beragam. Selain itu, naiknya pendapatan mendorong keluarga untuk berinvestasi pada pendidikan anak, termasuk perempuan, sehingga memperbesar peluang mereka masuk ke pekerjaan modern.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung landasan teori dan kerangka pemikiran dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dan penguatan argumentasi dapat dilihat di tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Penelitian terdahulu

No.	Peneliti, Tahun & Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dewi Puspita Sari, Fanny Nailufar, Khairil Anwar dan Mutia Rahmah (2024). Fenomena Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia.	- Indeks pemberdayaan gender (IDG)	- Indeks pembangunan gender (IPG)	IPG berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap TPAK perempuan dan IDG berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan di Indonesia.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 7 No. 3
2	Windu Kholbiya Sajati dan Amin Pujiati (2025). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Barat.	- Indeks pemberdayaan gender (IDG)	- Upah minimum regional (UMR) - Rata-rata lama sekolah (RLS) - Angka harapan hidup (AHH)	IDG dan UMR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TPAK perempuan, RLS berpengaruh negatif signifikan, AHH berpengaruh	El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 6 No 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				positif signifikan terhadap TPAK Perempuan.	
3	Aqila Diva Fajrina, Prayudha Ananta Moneyzar Usman, Arivina Ratih, dan Heru Wahyudi (2025). Analisis Faktor Penentu TPAK Berbasis Gender di Lampung (2018 – 2023)	- Indeks pemberdayaan gender (IDG)	- Indeks pembangunan gender (IPG) - RLS - UMK	UMK berpengaruh positif signifikan, RLS berpengaruh negatif signifikan, IDG dan IPG sama-sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TPAK perempuan.	Jurnal Ekonomik a dan Bisnis (JEBS) Vol. 5 No. 1
4	Nadiah Awary, Pangastuti Nur Sasmitaningro, Amanda Devita Sari, Aprillia Nilasari dan Kukuh Arisetyawan (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur Tahun 2018 – 2023.	- Indeks pembangunan manusia (IPM)	- UMR	IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap TPAK, sementara UMR negatif tidak signifikan.	Jurnal Bisnis Net Volume :7 No.2
5	Firda Armaatus S, Indah Dwi A, Silvie Putri Wahyuni E, Kukuh Arisetyawan, dan Aprillia Nilasari (2024). Pengaruh IPM dan UMK terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Jawa Tengah	- Indeks pembangunan manusia (IPM)	- Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja dan IPM berpengaruh positif signifikan.	Independent:Journal of Economics Vol.4 No. 3
6	Kiky Asmara dan Mohammad Wahed (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan	- Indeks pembangunan manusia (IPM)	- Tingkat kemiskinan - Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi	Journal of Economics Development Issues Vol. 7 No. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Sampang			angkatan kerja	
7	Bagas Aji Ramadhan dan Eni Setyowati (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten tahun 2017-2021.	- Indeks pembangunan manusia (IPM)	- Populasi Penduduk - UMR - Produk domestik regional bruto (PDRB)	IPM berpengaruh negatif dan UMR berpengaruh positif signifikan sementara, populasi penduduk dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis- Vol.21 No.3
8	Solagracia Velinov Hasian LG1 dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi (2024). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Studi Kasus Kepulauan Riau 2019- 2023	- Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita	- RLS perempuan - Upah perempuan - Jumlah perempuan di industri pengolahan	Rata-rata sekolah dan rata-rata upah berpengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah perempuan di industri pengolahan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan.	Indonesian Journal of Development Studies Vol.3 No.1
9	Wulan Kurniasari, Toto Gunarto dan Dedy Yuliawan (2025). Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan dan Pertumbuhan Ekonomi: Uji Hipotesis U-Feminisasi	- Produk domestik bruto (PDB) per kapita	- Indeks pemberdayaan gender - Indeks pembangunan manusia - Rasio ketergantungan	Produk domestik bruto per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan Signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.	Jurnal Ekono Insentif, Vol. 19 No. 1
10	Liton Chandra Voumik, Md. Hasanur Rahman, Md. Azharul Islam, Mohammad Abu Sayeem Chowdhury, dan Grzegorz Zimon (2023).	- Produk domestik bruto (PDB) per kapita	- Pendidikan Perempuan - Keterbukaan Perdagangan - Urbanisasi	Pendidikan perempuan dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan PDRB per kapita dan urbanisasi	Multidisciplinary Digital Publishing Institute Swiss (MDPI), Vol. 11 No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>The Impact of Female Education, Trade Openness, Per Capita GDP, And Urbanization on Women's Employment in South Asia: Application of CS-ARDL Model.</i>			berpengaruh negatif signifikan.	
11	Nurul Cholifah dan Sutrisno (2024). <i>Analysis Of Determinants Influencing the Labor Force Participation Rate (LFPR) of Women in East Java Province for the Years 2018-2022</i>	- Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita	- Pengeluaran per kapita - RLS perempuan - UMK	RLS perempuan berpengaruh positif signifikan, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, Pengeluaran per kapita perempuan berpengaruh positif signifikan, dan upah minimum Kab/Kota (UMK) berpengaruh negatif tidak signifikan.	Jambura Equilibrium Journal Vol. 6. No. 1
12	Rajisya Yumma Lathufinisa dan Khusnul Ashar (2025). <i>Analysis Of Determinants of Female Labor Force Participation Rate in East Java Province 2020-2023</i>	- Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita	- RLS - Jumlah orang yang mengurus rumah tangga - UMK	RLS berpengaruh positif tidak signifikan jumlah orang yang mengurus rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan, PDRB per kapita berpengaruh negatif tidak signifikan UMK berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan.	Journal Of Development Economic and Social Studies (JDESS) Vol. 4 No. 3
13	Manpreet Kaur dan Dr. Parneet Kaur (2025). <i>Empowering Women: Exploring the Dynamics of Female Employment. Literacy and Dependency</i>	- Rasio ketergantungan	- Literasi perempuan	Literasi perempuan berpengaruh signifikan dan rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan	International Journal Of Latest Technology In Engineering, Management & Applied

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Ratios in Indian States</i>				Science (IJLTEMAS) Vol. 14 No. 8
14	Suliman Alghamdi, dan Rozina Shaheen (2024). <i>The Demographical and Economic Factors Affecting Female Labor Force Participation in Saudi Arabia</i>	- Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita - Rasio ketergantungan	- Pendidikan tinggi - Urbanisasi - Harapan hidup - Pertumbuhan penduduk	PDRB per kapita, tingkat pendidikan, dan urbanisasi berpengaruh positif signifikan sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan. pengangguran, harapan hidup, dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan.	Journal Of Infrastructure Policy and Development Vol. 8 No. 6
15	Miguel A Vicens-Feliberty dan Francisca Reyes (2015). <i>Female Labor Force Participation and Dependency Ratios in Border States</i>	- Rasio ketergantungan	- Indeks pemberdayaan gender - Indeks pembangunan manusia - Produk domestik regional bruto per kapita	Rasio ketergantungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan,	Journal Of Borderlands Studies Vol. 30 No. 2

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019) kerangka pemikiran yaitu gambaran mengenai alur berpikir atau alur penelitian yang menjadi dasar peneliti dalam mengkaji objek yang diteliti. Dengan adanya kerangka ini peneliti dapat menentukan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini disusun guna melihat gambaran hubungan antara indeks pemberdayaan gender (IDG), indeks pembangunan manusia (IPM), rasio ketergantungan, dan PDRB Per kapita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan.

2.2.1. Hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender dengan TPAK Perempuan

Teori *feminist economics* menyebutkan bahwa semakin tinggi pemberdayaan perempuan di suatu wilayah maka semakin besar kesempatan perempuan di wilayah tersebut untuk memasuki pasar kerja. Oleh sebab itu, secara teoritis indeks pemberdayaan gender dianggap memiliki hubungan yang positif dengan TPAK perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrina *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa IDG memiliki koefisien yang positif meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita *et al.*, (2024) menemukan bahwa IDG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan.

2.2.2. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan TPAK Perempuan

Ketika pendidikan dan kesehatan yang didapat oleh perempuan meningkat maka memiliki kecenderungan untuk mendorong perempuan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga pada umumnya hubungan antara IPM dengan TPAK perempuan bersifat positif, karena IPM merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain beberapa penelitian menemukan bahwa hubungan IPM dengan TPAK perempuan itu tidak selalu sama, semuanya tergantung dengan perbedaan karakteristik sosial dan kesempatan kerja yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Armaatus *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja.

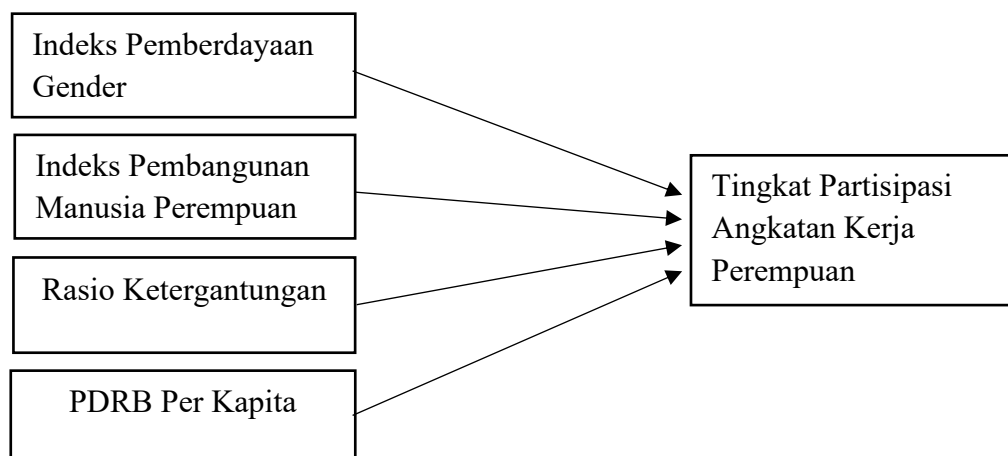
2.2.3. Hubungan antara Rasio Ketergantungan dengan TPAK Perempuan

Perempuan dengan beban tanggung jawab domestik yang tinggi cenderung menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Perspektif *Labor Force Theory* menyebutkan bahwa meningkatnya beban pengasuhan pada umumnya menarik perempuan untuk keluar dari pasar tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Alghamdi dan Shaheen (2024) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Selain itu World Bank juga menggarisbawahi beban ketergantungan merupakan hambatan utama perempuan untuk masuk dan bertahan di pasar tenaga kerja.

2.2.4. Hubungan antara PDRB Per Kapita dengan TPAK Perempuan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita dapat memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan aktivitas produksi dan daya beli rumah tangga secara riil. Dalam perspektif teori Transformasi Struktural, peningkatan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dengan TPAK perempuan karena mendorong pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa serta meningkatkan produktivitas. Perubahan tersebut memperluas permintaan tenaga kerja dan meningkatkan peluang partisipasi kerja perempuan dalam pasar tenaga kerja formal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Velinov dan Harmadi (2024) menemukan bahwa PDRB per kapita memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja.

kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Oleh karena itu dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang ada, didapat hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial indeks pemberdayaan gender , indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita berpengaruh positif, sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap TPAK perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018 – 2024.
2. Diduga secara bersama-sama indeks pemberdayaan gender, indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan, dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap TPAK perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018 – 2024.